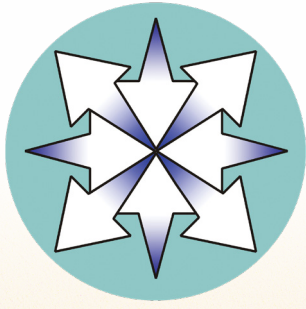


VOL. 47 NOVEMBER 2023

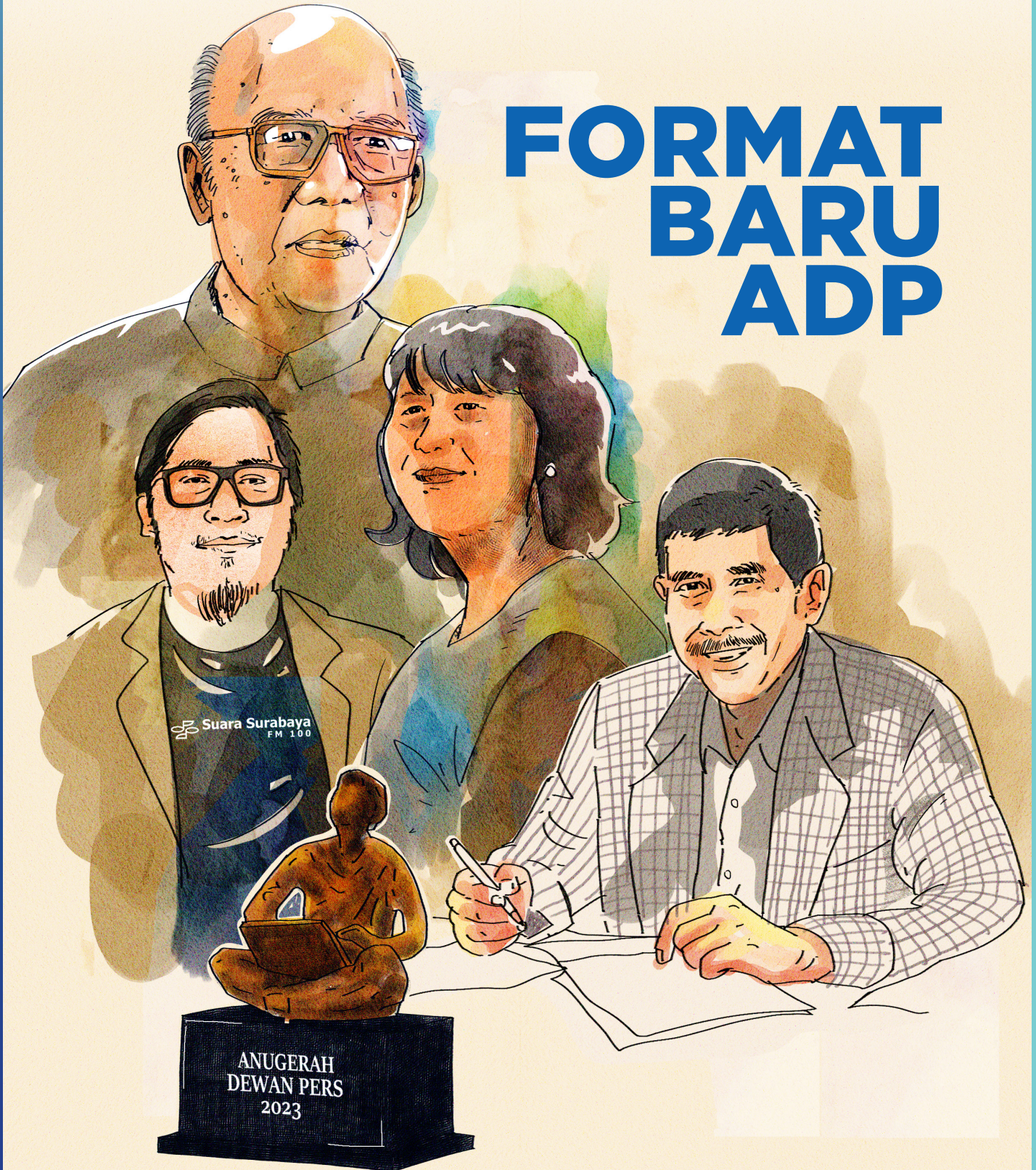


DEWANPERS

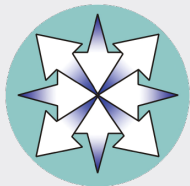
# ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

## FORMAT BARU ADP







DEWANPERS

Susunan Redaksi Buletin Etika:

Dewan Pengarah

Ketua:

Ninik Rahayu

Anggota Dewan Pers:

M Agung Dharmajaya  
Yadi Hendriana,  
Arif Zulkifli,  
Totok Suryanto,  
Paulus Tri Agung Kristanto,  
Asep Setiawan

Sekretaris Dewan Pers:

Syaefudin

Penanggung Jawab/  
Pemimpin Redaksi:

Asmono Wikan

Wakil Pemimpin Redaksi:

Atmaji Sapto Anggoro

Redaktur Pelaksana:

Arif Supriyono

Sekretaris Redaksi:

Firdha Yuni Gustia

Redaksi:

Reynaldo Adair,

Sekretariat Dewan Pers:

Wawan Agus Prasetyo,  
Reza Andreas,  
Elly Savitri Damayanthi,  
Watini

Desain & Ilustrasi:

Iwhan Gimbal,  
Yudhis

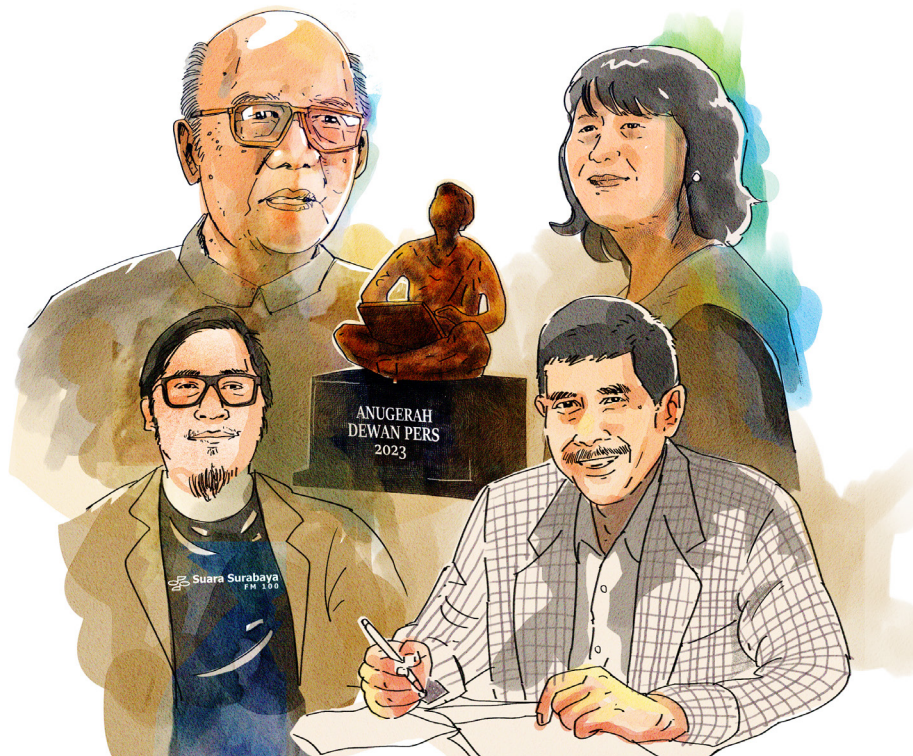
Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers,  
Jl. Kebon Sirih No.32-34,  
Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 10110  
Telp: 021-3521488, 021-3504877,  
021-3504874, 021-3504875

Media Sosial:

Facebook: Dewan Pers  
Twitter: @dewanpers  
Instagram: @officialdewanpers  
Youtube: Dewan Pers Official  
Website: www.dewanpers.or.id

Buletin Etika dalam format PDF  
dapat diunduh dari website  
secara gratis.



04. LAPORAN UTAMA

Empat Kategori  
Anugerah  
Dewan Pers

03. Kabar  
Kebon  
Sirih

16. Teropong

19. Lintas  
Berita

23. Grafik

24. Galeri



13. Opini  
Oleh: Arif Supriyono

# ANUGERAH CERMINAN DEWAN PERS

**P**embaca yang budiman, Dewan Pers kali ini menampilkan edisi ETIKA yang berkaitan dengan Anugerah Dewan Pers (ADP). Kali ini ADP berbeda dengan sebelum-sebelumnya.

Begini, beberapa tahun kita menggelar ADP yang berbasiskan pada karya jurnalistik. Rupanya itu menjadi tidak khas. Mengapa? Sebab, banyak sekali anggota konstituen Dewan Pers seperti PWI, AJI, IJTI, dan juga lembaga masyarakat lainnya telah melakukan penganugerahan berkaitan dengan karya jurnalistik (baik tulis, foto, video, sampai medsos), sehingga masyarakat akan bertanya-tanya, mana di antara anugerah itu yang paling tinggi. Kalaupun yang paling tinggi yang diadakan DP misalnya, harusnya antarpemenang diadu oleh DP. Toh kenyataannya tidak. Malah timbul kesan DP membuat ADP bersaing dengan anggota konstituennya.

Bersama konstituen, kami melakukan diskusi, apa yang khas dari DP untuk memberikan anugerah? Maka, disepakatilah ADP yang khas DP dan mencerminkan konstituen DP. Apakah itu? Tak lain dan tak bukan adalah tiga unsur: unsur wartawan, unsur perusahaan, dan tokoh masyarakat. Ini menceminkan keanggotaan atau representasi di Dewan Pers. Terjemahannya, ADP memberikan unsur wartawan yang menjadi panutan atau memberikan inspirasi, perusahaan yang menginspirasi dalam tata kelola dan meraih keuntungan tanpa kehilangan fungsi persnya untuk melakukan kontrol sosial, dan tokoh masyarakat yang memberikan peran besar dalam sumbangsuhnya terhadap pers Indonesia.

Setelah melalui proses penjurian panjang, seperti yang diketahui, terpilihlah Luviana Ariyanti dari Konde.com yang memiliki reputasi seagai jurnalis di berbagai penerbitan sampai mendirikan media sendiri. Perusahaan pers yang terpilih juara adalah Suara Surabaya (SS) yang semula radio publik (warga), berkembang ke digital dan maju serta masih menguntungkan. Bisnisnya efektif, medianya berpengaruh, meski kategorinya masih perusahaan menengah.

Sedangkan untuk tokoh masyarakat, kita memilih Letjen TNI (Purn) Yunus Yosfiah karena perannya membebaskan pers dari pemberedelan dengan perannya mendorong Undang-Undang Pers serta menghapus SIUPP (surat izin usaha penerbitan pers).

Satu lagi, ADP menambah kategori penting, yaitu Lifetime Achievement yang diberikan pada Atmakusumah Astraatmadja yang sepanjang hidupnya untuk pers. Ia mulai berkariier sebagai wartawan Antara sampai menjadi ketua Dewan Pers pertama. Laporan lengkap bisa diikuti di ETIKA edisi ini. Selamat membaca. ●



Vol 47 - November 2023

*Atmaji Sapta Anggoro*

Wakil Pemimpin Redaksi

# Empat Kategori Anugerah Dewan Pers



da yang berbeda dalam pelaksanaan Anugerah Dewan Pers (ADP) 2023 kali ini. Dalam dua kali penyelenggaraan ADP selama ini, tahun 2021 dan 2022, Dewan Pers membagi anugerah dalam beberapa kategori.

Untuk periode 2021, ADP diberikan untuk karya terbaik dari wartawan pada kategori media cetak, televisi, dan siber. Anugerah juga diberikan pada media terbaik untuk daring, cetak, dan televisi. Untuk media radio dan daring, bahkan ada anugerah berdasarkan kewilayahan, yakni wilayah Tengah/Timur dan Barat. Masih ada pula anugerah untuk perorangan nonpers dan lembaga nonpers yang dianggap memiliki peran penting dalam mengembangkan kemerdekaan pers. Dewan Pers juga memberikan anugerah pada tiga peringkat atas provinsi yang angka indeks kemerdekaan persnya tertinggi.

Pada pelaksanaan tahun 2022, anugerah diberikan pada kategori karya jurnalistik wartawan cetak, siber, radio, televisi, serta pewartafa foto. Di samping itu, ada juga anugerah untuk perusahaan pers untuk jumlah karyawan hingga 100 orang dan di atas 100 orang. Namun, anugerah atas dasar kewilayahan tidak lagi diadakan.

Rupanya banyak kalangan yang memberi perhatian lebih pada dua kali pelaksanaan ADP tersebut. Itu sebabnya mereka mengusulkan agar Dewan Pers memberikan format atau kategori berbeda dalam penganugerahan untuk komunitas pers tersebut.







DEWANPERS

# U GERAH AN PERS 2023



ANU  
DEWAN PERS 2023





Usulan perubahan format anugerah datang dari mantan pemimpin redaksi Harian Kompas, Ninuk Mardiana Pambudy, yang sekarang juga aktif di kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Menurut dia, Dewan Pers sebaiknya tidak memberikan anugerah dengan kategori yang sama dengan apa yang dilakukan oleh konstituen. Ninuk menyebut, anugerah yang telah dilakukan PWI dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) misalnya, nyaris sama dengan kategori yang diberikan oleh Dewan Pers.

“Kesannya seolah ada persaingan antara Dewan Pers dengan para konstituen dalam memberikan anugerah,” paparnya. Untuk itu, ia mengusulkan agar kategori dalam ADP berikutnya bisa berbeda dengan apa yang dilakukan konstituen.

Hal serupa diutarakan oleh jurnalis radio yang pernah menjadi Direktur Suara Amerika (Voice of America), Frans Padak Daemon. “Saya sepakat jika anugerah yang diberikan Dewan Pers dibedakan kategorinya dengan yang diadakan konstituen,” ungkap Frans yang memulai karier sebagai wartawan Nippon Hoso Kyokai (NHK) Jepang.

Masukan ini lalu diolah oleh tim Dewan Pers. Usulan itu kemudian menjadi keputusan bersama semua anggota Dewan Pers yang berjumlah sembilan orang. Melalui beberapa kalil diskusi, Dewan Pers akhirnya memutuskan untuk membuat empat kategori yang akan memperoleh ADP 2023. Keempat kategori itu meliputi: wartawan/jurnalis terbaik, media terbaik, tokoh masyarakat yang berperan penting pada perkembangan pers



*Melalui beberapa kalil diskusi, Dewan Pers akhirnya memutuskan untuk membuat empat kategori yang akan memperoleh ADP 2023.*



Rapat perdana penyelenggaraan Anugerah Dewan Pers 2023 yang dihadiri oleh konstituen Dewan Pers pada Kamis (20/6/2023) di Hall Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)





 Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu didampingi anggota Dewan Pers, Asmono Wikan bersama staf sekretariat Dewan Pers melakukan rapat persiapan Anugerah Dewan Pers 2023 pada Jumat (15/9/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)



*Menurut Ninik, dalam kehidupan dunia pers tidak terlepas ada tiga entitas penting yang ikut berkontribusi pada perkembangan pers nasional.*

nasional, dan *life time achievement* (atau pengabdian sepanjang hayat untuk pers nasional).

Dengan begitu, untuk kategori jurnalis, anugerah hanya akan diberikan pada satu orang dari semua platform media, baik cetak, elektronik, daring, maupun foto. Demikian pula untuk media terbaik, pemenangnya hanya satu dari semua jenis media. Hal serupa juga diberikan untuk tokoh masyarakat yang berperan penting dalam kemerdekaan pers maupun tokoh yang meraih *life time achievement*.

Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, mengakui perlunya mempertimbang-

kan masukan dari konstituen. Atas dasar itu pula, ia sepenuhnya sepakat dengan usulan dari para anggota konstituen Dewan Pers. Perubahan kategori yang diusulkan konstituen pun menjadi acuan dalam memberikan anugerah.

Menurut Ninik, dalam kehidupan dunia pers tidak terlepas ada tiga entitas penting yang ikut berkontribusi pada perkembangan pers nasional. Tiga entitas itu adalah wartawan, perusahaan pers, dan para tokoh masyarakat. Pentingnya kehadiran tiga entitas ini bahkan dikukuhkan di dalam UU 40 tahun 1999 tentang Pers, yang sekaligus merupakan representasi dari anggota Dewan Pers.



Dalam keanggotaan Dewan Pers selalu ada unsur perwakilan wartawan, perusahaan pers, dan tokoh masyarakat. “Secara eksplisit ada dua hal penting kalau kita menginginkan pers kita merdeka. Dua penunjang itu adalah wartawan dan juga perusahaan pers yang harus sama-sama profesional,” ujarnya.

Tentu yang tidak kalah penting, ungkapnya, adalah kebersamaan dan perjuangan para tokoh dan masyarakat yang ikut menyuarakan dan menjunjung tinggi demokrasi. Atas kecintaan pada demokarasi itulah pers kita bisa menjadi lebih maju. Ia kembali mengingatkan, bahwa pers adalah salah satu pilar dari demokrasi, di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk terus mendorong semangat dan memberikan apresiasi pada jurnalis dan penggerak

kemerdekaan pers, maka Dewan Pers memandang perlunya memberikan anugerah tersebut.

“Di tengah-tengah pesta demokrasi yang saat ini dilakukan bangsa Indonesia, yaitu pemilu, kita juga mendengar, pada tahun 2022 dan 2023 laporan dari *freedom house* menunjukkan bahwa ada penurunan selama setahun kebebasan sipil dan kebebasan politik,” kata Ninik. Tentu ini adalah paradoks karena hampir semua negara menginginkan dan mencita-citakan demokrasi semakin tegak.

Pada konteks inilah, tuturnya, barang kali kehadiran pers menjadi sangat penting, bagaimana memperdalam dan memperluas makna demokrasi dengan melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat untuk ikut serta di dalam pesta

Anggota Dewan Pers, Asmono Wikan yang juga sebagai penanggung jawab Anugerah Dewan Pers 2023 menyampaikan laporan kegiatan Anugerah Dewan Pers 2023 di Acara Puncak Anugerah Dewan Pers 2023 pada Jumat (10/11/2023) di Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)





demokrasi. Pers akan menjembatani informasi-informasi yang sangat diperlukan oleh publik, bagaimana demokrasi kita bisa ditunjukkan secara kebutuhan realitas masyarakat.

ADP ini, papar Ninik, adalah salah satu bentuk ucapan terima kasih dan apresiasi dari insan pers kepada mereka yang sudah memperjuangkan demokrasi melalui pers. Untuk itu Dewan Pers memberikan apresiasi ini kepada wartawan, kepada perusahaan pers, dan tokoh masyarakat. Atas nama Dewan Pers, dia menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada para dewan juri, konstituen, korporasi, dan perusahaan yang sudah memberikan dukungan sepenuhnya dalam penyelenggaraan ADP kali ini.

“Selamat kepada para penerima ADP, baik itu perusahaan pers, para wartawan, dan juga tokoh masyarakat serta rasa hormat saya kepada penerima *lifetime achievement award* pada malam hari ini. Saya berharap penyelenggaraan ADP bisa memberikan kontribusi dan dedikasi yang setinggi-tingginya untuk menggelorakan semangat bagi insan pers dalam rangka menegakan demokrasi kita,” kata dia.

Sedangkan Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi (KIK) Dewan Pers, Asmono Wikan, mengungkapkan ADP kali ini mengusung tema yang akan diselenggarakan secara berkelanjutan. Tema utama tetap adalah Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Berkualitas, dan Keberlanjutan Media. Khusus tahun ini Dewan Pers menetapkan tema



Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Acara Puncak Anugerah Dewan Pers 2023 pada Jumat (10/11/2023) di Jakarta.

(FOTO: DEWAN PERS)



**Tujuan pemberian anugerah ini antara lain untuk mempromosikan kemerdekaan pers, jurnalisme berkualitas, dan mendukung keberlanjutan media.**

Menjaga Independensi dan Profesionalisme Pers di Tahun Politik, sebuah tahun akan sangat dinamis.

Tahun ini Dewan Pers menetapkan tujuan dari penyelenggaraan anugerah ini yang pertama adalah untuk mempromosikan kemerdekaan pers, jurnalisme berkualitas, dan mendukung keberlanjutan media. Kedua, memberikan apresiasi kepada jurnalis, lembaga pers, dan masyarakat yang memiliki rekam jejak dalam berkontribusi bagi kemerdekaan pers, jurnalisme berkualitas, dan keberlanjutan media. Lalu ketiga, memberikan motivasi kepada ekosistem pers untuk senantiasa menjaga kemerdekaan pers melalui karya-karya jurnalisme berkualitas.

Menurut Asmono, secara keseluruhan proses penyelenggaraan acara ini memerlukan persiapan selama tiga bulan. Ini tentu tidak lepas dari proses penjurian yang sangat matang dan terukur. • Arif Supriyono/tenaga ahli Dewan Pers

# Penerima ADP 2023



## HM Yunus Yosfiah

PRIA kelahiran Makassar 79 tahun lalu dan lulusan Akademi Militer Nasional 1965 itu menerima Anugerah Dewan Pers untuk kategori tokoh masyarakat yang berperan besar dalam menjaga kemerdekaan pers. Keputusannya membebaskan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) untuk mendirikan perusahaan pers dianggap sebagai tonggak utama kemerdekaan pers.

Kebijakan penghapusan SIUPP itu ia lakukan saat pria beristri Antonia Ricardo dari Timor Leste itu menjadi menteri penerangan era Presiden BJ Habibie 1998-1999.



Menteri Penerangan Republik Indonesia periode 1998-1999, Letjen TNI (Purn.) Muhammad Yunus Yosfiah meraih penghargaan Anugerah Dewan Pers kategori Tokoh Masyarakat. (FOTO: DEWAN PERS)

Kebijakan ini merupakan terobosan terbesar dalam sejarah pers nasional. Itu pula yang membuat kalangan pers menjuluki Presiden Habibie sebagai Bapak Kemerdekaan Pers.

Di militer, pangkat terakhir HM Yunus Yosfiah adalah letjen pur-nawirawan. Selain menteri penerangan, Yunus pernah menjabat sebagai pangdam II/Sriwijaya, kepala staf sosial politik (kassospol) ABRI, ketua Fraksi ABRI di MPR,

dan anggota DPR periode 2004-2009. Ia sempat pula menjadi sekjen Partai Persatuan Pembangunan.

Mengenang situasi pers di era reformasi, Yunus yang pernah mengenyam pendidikan militer di Amerika Serikat, memandang bahwa untuk ukuran negara sebesar Indonesia, jumlah penerbit pers yang hanya sekitar 280 perusahaan saat itu, tahun 1998/1999, terlalu sedikit. Dengan penghapusan SIUPP, jumlah perusahaan pers bahkan mencapai lebih dari 1.200 hanya dalam enam bulan. "Waktu itu saya melapor dulu kepada Presiden Habibie sebelum mengeluarkan kebijakan kemudahan pengurusan SIUPP tersebut dan beliau langsung menyetujui," kata Yunus saat menerima ADP di kediamannya karena tidak bisa hadir di acara puncak anugerah.

"Saya sangat berterima kasih atas penghargaan ini. Semoga pers Indonesia semakin maju," ucap Yunus

## Atmaksumah Astraatmadja

NYARIS sepanjang hayatnya ia didedikasikan untuk kepentingan pers nasional. Sejak usia remaja, ia telah bergelut dengan dunia jurnalisme. Ia mengawalinya sebagai komentator berita nasional dan internasional di RRI, lalu penyiar di Radio Australia, Radio Jerman, dan Persbiro Indonesia.

Setelah itu ia menjadi redaktur Kantor Berita Antara dan Harian Indonesia Raya hingga menjadi redaktur pelaksana (1968-1974). Sampai akhirnya koran yang didi-





Ketua Dewan Pers periode 2000-2003, Atmakusumah Astraatmadja meraih penghargaan Anugerah Dewan Pers kategori Lifetime Achievement... (FOTO: DEWAN PERS)

rikan dan dipimpin Mochtar Lubis itu diberedel pemerintah dan dia menjadi orang terakhir media tersebut. Mochtar Lubis sempat ditetapkan sebagai tahanan kota. Ya, Indonesia Raya memang dikenal sebagai media paling kritis, baik di era Orde Lama maupun Orde Baru.

Pria kelahiran Labuan, Banten, 84 tahun lalu itu juga mengajar di beberapa tempat, terutama di Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) yang juga pernah nakhodainya. Atmakusumah merupakan ketua Dewan Pers pertama setelah lahirnya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebelum itu, ketua Dewan Pers secara *ex officio* dijabat oleh menteri penerangan.

Meski tak berkiper langsung di dunia jurnalistik, tulisan Atmakusumah masih tersebar di mana-mana. Hampir semua media

nasional pernah dia singgahi lewat tulisannya.

Ia mengapresiasi perkembangan kemerdekaan pers yang diperjuangkan insan pers saat ini. Dengan tidak boleh ada pemberedelan dan tidak boleh ada penyensoran terhadap media pers, Atmakusumah melihat bahwa situasi kebebasan berekspresi, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers kini semakin terjamin. "Boleh dikatakan tidak ada media media pers yang terkena tekanan-tekanan dari pihak pemerintah dan saya kira pejabat pemerintah juga semakin memahami bahwa pers itu juga dibatasi sangat keras oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ)," kata dia.

## Luviana Ariyanti

PENGEMBARAANNYA di dunia jurnalistik bisa dikatakan telah komplit. Dunia jurnalistik sudah ia geluti selama 25 tahun, mulai jenjang reporter, redaktur, produser, hingga pendiri dan pemimpin redaksi. Ia bahkan juga pernah men-

jadi produser dan sutradara film pada isu-isu media, teknologi, serta kelompok minoritas.

Lulusan program studi komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta dan Pascasarjana Universitas Paramadina Jakarta itu telah menjadi jurnalis di era reformasi. Ia pernah menjelajahi dunia radio, media cetak, media daring, dan juga televisi. Ia sempat bekerja di Radio RB FM Yogyakarta, Jurnal Perempuan, Kantor Berita Radio (KBR) 68H, Radio Utan Kayu, Metro TV, dan kini menjadi pemimpin redaksi media perempuan [www.konde.co](http://www.konde.co). Luviana pun berbagi ilmu dengan mengajar di Universitas Paramadina.

Aneka forum internasional ia hadiri, baik sebagai peserta maupun pembicara. Luviana mendapatkan sejumlah penghargaan: Tasrif Award dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia (2013), lalu LBH Jakarta Award (2015), nominasi N-Peace Award dari United Nation/UN (2014). Filmnya berjudul "More than Work" yang berkisah tentang potret buram tubuh perempuan di media masuk dalam nominasi *short documentary* Festival Film Dokumenter (2019), sebuah festival film dokumenter se-Asia Tenggara.

Terhadap kemerdekaan pers, ia menyebut ada pembonceng gelap demokrasi saat ini. Pertama adalah buzzer yang digunakan kekuasaan untuk menindas. Kedua, *influencer* yang sibuk sekali mencari uang, dan ketiga yaitu netizen yang suka bicara tak sedap. "Sayangnya media menjadi orang yang menonton ini setiap hari dan masih menuliskan mereka sebagai narasumber," ujarnya. Selain Luviana, dua nomine lainnya ada Victor Mam-



bor (Papua Jubi) dan Luh De Suriyani (belabengong.id).



Pemimpin Redaksi Konde.co, Luviana Ariyanti meraih penghargaan Anugerah Dewan Pers 2023 kategori Wartawan Terbaik. (FOTO: DEWAN PERS)

## PT Radio Fiskaria Jaya Suara Surabaya

STASIUN radio Suara Surabaya sangat dikenal di Jawa Timur. Perusahaan pers di bawah PT Radio Fiskaria Jaya Suara Surabaya itu berada di frekuensi 100 FM. Laporan kondisi lalu lintasnya setiap pagi hari senantiasa menjadi panduan warga Surabaya dan bahkan dengan jaringannya bisa menjangkau juga hingga Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Gresik, Tuban, Jombang,



Pemimpin Redaksi Suara Surabaya Media, Eddy Prastyo mewakili PT Radio Fiskaria Jaya Suara Surabaya menerima penghargaan Anugerah Dewan Pers 2023 untuk Kategori Perusahaan Media Terbaik. (FOTO: DEWAN PERS)



Malang, Sumenep, Batu, Madiun, Bojonegoro, Solo, Jepara, Jember, Situbondo, Banyuwangi, Ponorogo, dan Kediri.

Mengudara pertama kali pada 11 Juni 1983, radio SS (demikian nama radio ini dikenal masyarakat) memiliki empat jaringan di Surabaya dan Mojokerto. SS pun kini juga memiliki portal berita suarasurabaya.net yang berdiri sejak 1999 dan menjadi bagian dari Suara Surabaya Media.

Pemimpin Redaksi Suara Surabaya Media, Eddy Prastyo, mengaku anugerah ini sebuah proses yang agak mengejutkan. “Baru pertama kali kami diwawancara untuk anugerah ini dan rasanya seperti ujian disertai. Ini adalah buah karya dari audiens kami, Suara Surabaya Media. Kami menggunakan metode jurnalistik tapi jurnalis kami sebenarnya tidak banyak yang banyak adalah pendengar kami sebagai jurnalis warga, jumlahnya sekitar 700.000 orang. Kami berupaya untuk secara konsisten mengedukasi, mengajak mereka untuk memberikan laporan yang berbasis jurnalistik,” ungkap Eddy.

Menurut Eddy, SS membutuhkan mereka sebagai sendi demokrasi dan dan terus berupaya untuk melakukan penguatan pada sendi-sendi publik. “Terima kasih Dewan Pers dan almarhum Mas Erol Jonathans. Sebenarnya ini adalah untuk beliau. Kami belajar banyak dari beliau dan ini adalah warisan yang harus kami jaga dan Radio SS supaya tetap menjaga jurnalismenya,” paparnya. Selain PT Radio Fiskaria Jaya Suara Surabaya, dua perusahaan media lain menjadi nominator, yakni PT Radio Elshinta Jakarta dan PT SMG Solopos Media Group. • *Arif Supriyono/tenaga ahli Dewan Pers*



# Satuan Tugas

Oleh  
**Arif Supriyono \*)**



**S**UATU peristiwa atau kegiatan penting, apalagi berlangsung dalam rentang waktu cukup lama, biasanya memerlukan penanganan khusus. Bahkan sering kali hal itu juga memerlukan pembentukan petugas khusus untuk menangani kasus-kasus yang mungkin timbul dari agenda penting tersebut.

Hal ini pula yang menjadi perhatian Dewan Pers menyongsong kampanye dan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) pada 14 Februari 2024 nanti. Paling tidak ada dua langkah penting yang dijalankan Dewan Pers berkaitan dengan pemilu kali ini. Dewan Pers telah membentuk dua satgas

Pertama adalah pembentukan satuan tugas (satgas) pengaduan atau sengketa pemberitaan yang berhubungan dengan pemilu. Kedua, membentuk satgas penanganan kekerasan terhadap pers dalam liputan pemilu. Dua satgas itu dibuat sebagai bentuk kepedulian Dewan Pers terhadap pers dan ekosistem media nasional.

Dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya, beberapa kali terjadi kemarahan massa akibat pemberitaan yang dianggap





merugikan kelompok maupun calon yang didukungnya. Kemarahan massa itu bisa berujung dengan dilakukannya ancaman, tindakan kekerasan terhadap wartawan, perusakan alat kerja, dan malahan ada pula massa yang melampiaskan dengan membakar kantor sebuah media.

Kekerasan itu bisa saja terjadi lantaran ketidakpuasan atas berita yang dimuat atau diunggah oleh media tertentu. Bukan tidak mungkin pula tindak kekerasan dipicu oleh pemberitaan yang tidak akurat. Atas dasar pelbagai hal itulah, Dewan Pers berkepentingan untuk mencegah terjadinya tidak kekerasan yang berhubungan dengan pemberitaan.

Inilah yang menjadi tugas utama satgas pengaduan pemberitaan pemilu. Massa atau partai politik yang merasa dirugikan oleh pemberitaan --baik berita yang memang keliru atau intepretasi massa yang tidak tepat-- bisa mengadukannya ke satgas. Sudah pasti hal ini memerlukan bukti-bukti untuk mendukung pengaduan itu.

Dewan Pers juga menuntut satgas untuk bekerja keras dan intensif. Dalam rentang waktu 24 jam, satgas haru sudah bisa menyelesaikan atau mengambil keputusan setelah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak. Penundaan keputusan atas sengketa pemberitaan pemilu bisa berakibat munculnya ketidakpuasan masyarakat pemilih atau pendukung.

Melalui mekanisme pengaduan pemberitaan pemilu ini, tindakan main hakim sendiri karena

ketidakpuasan atas berita yang tersaji bisa dicegah. Perusahaan pers pun dituntut untuk bertanggung jawab atas berita yang mereka sajikan kepada khalayak. Ujungnya adalah terciptanya kejujuran dan keterbukaan serta keadilan dalam proses pemberitaan. Setiap pihak yang terlibat dalam sengketa pemberitaan harus melakukan tindakan sesuai kesepakatan yang diambil. Pers haruslah memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara akurat, jujur, dan berimbang.

Adapun satgas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap wartawan dalam pemilu memang lebih fokus untuk melindungi para jurnalis. Beberapa fakta memperlihatkan adanya tindak kekerasan yang dialami oleh wartawan yang berhubungan dengan liputan pemilu.

Pada survei yang dilakukan oleh UNESCO (United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization) terhadap 138 wartawan di 17 provinsi empat bulan lalu di Indonesia ditemukan data beberapa hambatan terhadap wartawan. Sebanyak 36,9% mengaku pernah mendapat intimidasi atau ancaman terkait pemberitaan pemilu. Sekitar 32% tidak mengalami intimidasi atau ancaman. Sedangkan sisanya mengalami pelarangan liputan (15,6%), kekerasan fisik (6,6%), perampasan alat liputan (4,1%), dan serangan digital (3,3%).

Fakta ini jelas memperlihatkan pentingnya upaya memberi perlindungan yang lebih besar lagi kepada



wartawan dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan liputan seputar pemilu. Tradisi untuk melampiasikan kekesalan atau melakukan kekerasan pada insan pers bagaimanapun harus dihentikan.

Ditemukan pula fakta lain, bahwa pelaku tindak kekerasan/intimidasi terhadap jurnalis juga bervariasi. Ada kekerasan yang dilakukan oleh tim sukses/partai (33,3%), tidak tahu (29,4%), kandidat (11,9%), simpatisan (7,1%), penyelenggara pemilu (5,6%), dan preman/orang suruhan (4%).

Salah satu upaya menghindari kemarahan massa adalah menjalankan tugas jurnalistik dengan sebaik-baiknya. Bersikap profesional, menyajikan berita secara berimbang, menjauhi prasangka, berpedoman pada kaidah pemberitaan, serta memegang teguh Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan perisai paling efektif untuk memperkecil kemungkinan menjadi sasaran amarah massa.

Sejauh ini, belum ada laporan dari massa pendukung terhadap pemberitaan pemilu kali ini yang dirasakan merugikan pihak mereka. Belum pula ditemukan adanya laoran kekerasan yang menimpa para jurnalis maupun perusahaan pers pun selama berlangsungnya tahapan pemilu 2024.

Selain Dewan Pers, lembaga lain yang membentuk satgas adalah kepolisian. Dalam pelbagai kesempatan, Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Irjen Pol Sandi Nugroho, mengutarakan bahwa lembaganya telah membentuk satgas antipolitik uang. Tujuan utama satgas ini bukanlah untuk menangkap para pelaku politik uang yang memang dilarang dalam pemilu.

Satgas antipolitik uang itu akan lebih mengutamakan tindakan pencegahan kepada tim sukses maupun kandidat untuk membagi-bagikan uang kepada massa. Satgas akan merangkul beberapa elemen untuk memantau praktik politik uang. Di samping Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), satgas ini juga akan melibatkan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Keberadaan satgas antipolitik uang ini tidak kalah penting dibanding dua satgas bentukan Dewan Pers. Satgas ini bahkan bisa dikatakan amat strategis.

**Salah satu upaya menghindari kemarahan massa adalah menjalankan tugas jurnalistik dengan sebaik-baiknya. Bersikap profesional, menyajikan berita secara berimbang, menjauhi prasangka, berpedoman pada kaidah pemberitaan, serta memegang teguh Kode Etik Jurnalistik (KEJ).**

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa setiap adanya pesta demokrasi pemilu dan pemilukada (juga pilkades), uang selalu berseliweran dan menjadi alat utama untuk menggaet dukungan massa.

Selama ini, nyaris tidak pernah ada tindakan memadam dari aparat --termasuk Bawaslu-- terhadap pelaku politik uang. Para pelakunya begitu leluasa melakukan 'serangan fajar' (memberi uang pada calon pemilih) yang hendak menuju bilik pemungutan suara.

Masyarakat berharap, pembentukan satgas antipolitik uang itu bukan sekadar formalitas belaka. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu haruslah bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Jika tidak, masyarakat akan apatis dan kepercayaan kepada aparat dalam kaitannya dengan pemilu akan semakin menipis. • **Arif Supriyono/tenaga ahli Dewan Pers.**

# Mendorong Karya Jurnalistik Mahasiswa



EKELOMPOK anak muda terlihat berkumpul di salah satu sudut Ballroom Hotel JW Marriott Jakarta, tempat gelaran Anugerah Dewan Pers 2023 diselenggarakan. Ini bukan pemandangan yang lazim. Sudah tiga tahun terakhir Anugerah Dewan Pers 2023 digelar. Untuk kali pertama Dewan Pers turut memberikan apresiasi kepada pers mahasiswa melalui kompetisi karya jurnalistik yang diumumkan pada malam puncak acara.

Pelibatan pers mahasiswa ini bukan tanpa maksud. Menurut Asmono Wikan, ketua Komisi Informasi dan Komunikasi Dewan Pers sekaligus ketua Panitia Anugerah Dewan Pers 2023, Dewan Pers tengah menjadikan kampus dan mahasiswa sebagai salah satu prioritas. Menurut dia, kampus sejatinya bukan hanya menjadi tempat untuk mahasiswa menimba ilmu, tetapi juga menjadi inkubator pengembangan diri dan merupakan wadah tumbuhnya idealisme bagi generasi muda. Di bidang pendidikan jurnalistik, kampus menjadi pijakan awal bagi tumbuhnya pemikiran kritis dalam menciptakan karya-karya jurnalistik berkualitas.

Asmono juga berpendapat bahwa pers mahasiswa adalah laboratorium pers profesional. Sebagian besar pers nasional merekrut jurnalis yang punya pengalaman sebagai anggota pers mahasiswa. "Maka mendorong karya jurnalistik yang berkualitas untuk pers mahasiswa tentu memerlukan pemicu. Salah satunya memberikan motivasi melalui kompetisi bergengsi ini," jelas Asmono.

Di sisi lain, pelibatan pers mahasiswa di hajat besar semacam Anugerah Dewan Pers ini juga menunjukkan komitmen Dewan Pers dalam memberikan ruang kepada pers mahasiswa yang saat ini masih belum memiliki payung hukum yang jelas dalam beraktivitas jurnalistik. Kesan ini ditangkap oleh Abdul Latif, wakil pemenang kompetisi dari LPM Suara Kampus, UIN Imam Bonjol Padang. Dia mengutarakan, kompetisi ini adalah bentuk dukungan dari Dewan Pers terhadap pers mahasiswa yang juga melaksanakan tugas-tugas jurnalistik namun payung hukumnya masih belum jelas.

Gratio Ignatius Sani Beribe, wakil Lembaga Pers Mahasiswa Perspektif Universitas Brawijaya yang





meraih dua predikat pemenang juga menyatakan hal senada. “Apresiasi seperti ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kami yang sedang merawat napas-napas kecil pers mahasiswa di Indonesia yang sedang ditantang relevansinya dewasa ini,” ujarnya.

Meskipun demikian, mereka tak menampik bahwa kegiatan seperti ini juga menjadi masukan dan motivasi bagi mereka dalam mewujudkan perbaikan kualitas jurnalistik. Gratio mengatakan kompetisi ini menjadi wadah bagi mereka untuk memperbaiki kualitas karya-karya jurnalistik yang dihasilkan. Sementara Abdul menilai, kompetensi seperti ini juga menjadi barometer kemampuan pers mahasiswa dalam melaksanakan tugas jurnalistik sehingga bisa menjadi

evaluasi bagi kita sebagai kader-kader jurnalis nantinya.

Tahun ini, pers mahasiswa ditantang untuk unjuk kebolehan dalam menulis *feature*. Ada tiga kategori yang dilombakan dengan tema bebas, yakni kategori *feature* profil, kategori *feature* perjalanan, dan kategori *feature* isu-isu kemanusiaan (*human interest*). Kriteria penilaian yang ditetapkan juga tidak main-main. Pers mahasiswa harus memperhatikan tiga aspek, kualitas karya jurnalistik yang menekankan pada kedalaman liputan dan penerapan Kode Etik Jurnalistik, kualitas pengemasan tampilan, juga kejelian dalam menentukan momentum dan konteks.

Kompetisi ini ternyata memang dinantikan oleh para aktivis pers mahasiswa. Ratusan karya yang masuk membuktikan antusiasme



Para Pemenang kompetisi karya jurnalistik pers mahasiswa bertofor bersama usai malam puncak Anugerah Dewan Pers 2024 pada Jumat (10/10/2023) di Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

tunas pers berkualitas ini meskipun tidak semua yang akhirnya lolos ke tahap berikutnya karena berbagai ketentuan yang belum terpenuhi. Meskipun demikian, secara umum kualitas jurnalisme insan pers muda ini cukup baik walau masih perlu peningkatan. Hal ini menunjukkan, bahwa dukungan mutlak dari Dewan Pers diperlukan untuk membersamai mereka. Ternyata harapan jurnalisme berkualitas masa depan masih menyala. • **Firdha Yuni Gustia/tenaga ahli Dewan Pers.**



**A** Penyelesaian pengaduan antara Yayasan Asram (Pengelola SD Al Azhar 59, Selang, Wonosari) vs sorot.co dan pidjar.com pada Sabtu (25/11/2023) di Yogyakarta. (FOTO: DEWAN PERS)



## Laporan Kasus Pengaduan Oktober 2023

### OKTOBER

#### Risalah No 57

Rahmad Mas'ud dengan suara.com

#### Risalah No 58

Novrizon Burman dengan inforohil.com







Diskusi Nasional Penyusunan Pedoman Pemantauan Media pada Selasa (28/11/2023) di Semarang, Jawa Tengah. (FOTO: DEWAN PERS)

# Dewan Pers Susun Pedoman Pemantauan Media

**SEMARANG**--Keberlanjutan pers perlu dijaga dengan melibatkan pemantauan dan pengawasan yang diharapkan dapat memastikan peran pers sebagai pilar demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Tidak hanya Dewan Pers, elemen masyarakat sipil turut memiliki peran penting dalam berkontribusi untuk mengembangkan kemerdekaan pers.

Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, mengutarakan hal itu ketika membuka

Diskusi Nasional Penyusunan Pedoman Pemantauan Media di Hotel Gumaya, Semarang Jawa Tengah, Selasa (28/11/2023). Diskusi ini merupakan putaran final dari acara serupa yang digelar sepanjang tahun 2023. Sebelumnya acara ini diselenggarakan di enam kota lainnya di Indonesia.

Melihat dari sudut pandang yang berbeda, Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), Masduki, berpendapat bahwa pemilik media tidak luput dari

pemantauan. Konten sebuah media merefleksikan siapa yang membiayai konten tersebut, dalam hal ini adalah pemilik media. Oleh karena itu, pemilik media hingga ideologinya perlu dipantau pula.

Hasil dari diskusi ini akan difinalisasi bersama seluruh konstituen di Jakarta dalam waktu dekat. Diharapkan peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemantauan Media bisa segera terbit di awal tahun 2024.●

## Dewan Pers Serahkan Penghargaan kepada Yunus Yosfiah

JAKARTA--Letnan Jenderal TNI (Purn) M Yunus Yosfiah, menteri penerangan di masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, di kediamannya menerima trofi Anugerah Dewan Pers 2023, sebagai Tokoh Masyarakat pendukung Kemerdekaan Pers, Jakarta Barat, Kamis (23/11/2023), Penyerahan trofi dilakukan oleh anggota Dewan Pers, Asmono Wikan, yang juga merupakan ketua panitia Anugerah Dewan Pers tahun ini.

Di masa kepemimpinannya, jumlah penerbitan pers bahkan mencapai lebih dari 1.200 perusahaan, hanya dalam tempo enam bulan setelah pelonggaran kebijakan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) yang ia terapkan. "Waktu itu saya melapor dulu kepada Presiden Habibie sebelum mengeluarkan kebijakan kemudahan pengurusan



Anggota Dewan Pers, Asmono Wikan (kiri) menyerahkan trophy Anugerah Dewan Pers 2023 kepada Menteri Penerangan Republik Indonesia periode 1998–1999, Letjen TNI (Purn.) Muhammad Yunus (kanan) Yosfiah sebagai peraih kategori Tokoh Masyarakat pada Kamis (23/11/2023) di Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

SIUPP tersebut," kenang Yunus dengan ingatan yang masih kuat.

"Saya sangat berterima kasih atas penghargaan ini. Semoga pers Indonesia semakin maju," ucap Yunus. Puncak acara penyerahan penghargaan ADP 2023 telah terselenggara di Jakarta, Jumat (10/11/2023) silam. Yunus tidak sempat hadir waktu itu.



*Saya sangat berterima kasih atas penghargaan ini. Semoga pers Indonesia semakin maju."*

M Yunus Yosfiah

## Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan Eksekutif UNESCO

PARIS – Indonesia akhirnya kembali menjadi anggota Dewan Eksekutif UNESCO (United Nation Education Scientific and Cultural Organization) periode 2023-2027. Dengan demikian, sejak masuk UNESCO 1950, ini merupakan kali kedelapan bagi Indonesia sebagai anggota Dewan Eksekutif.





Dalam pemilihan tersebut, Indonesia masuk kelompok Regional IV. Indonesia berkompetisi dengan 8 (delapan) negara lain di kawasan Asia Pasifik dalam memperebutkan 6 (enam) alokasi kursi Dewan Eksekutif UNESCO. Negara itu adalah Afghanistan, Australia, Bangladesh, Iran, Kyrgyzstan, Pakistan, Korea, dan Sri Lanka. Indonesia berhasil meraih dukungan suara dari 154 negara –dari 188 negara yang hadir-- dan menempati posisi tertinggi kedua di Kelompok IV.

Nantinya salah satu tugas Indonesia nanti adalah berpartisipasi aktif dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis terkait program-program dan kebijakan UNESCO. Dewan Eksekutif juga memainkan peran penting dalam mengawasi pelaksanaan program-program UNESCO dan memastikan penggunaan anggaran organisasi berjalan efisien dan efektif sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. ●

▲ Delegasi Indonesia dalam Konferensi Umum ke-42 Unesco di Paris dipimpin oleh Dubes Indonesia di Prancis, Andorra, dan Monako, Mohamad Oemar (tengah tidak berkacamata) dan Wakil Duta Besar, Prof. Ismunandar (berdasi Merah). (FOTO: DOK. UNESCO)

▼ Ketua Dewan Pers periode 2000-2003, Atmakusumah Astraatmadja. (FOTO: DEWAN PERS)

## Atmakusumah Raih Lifetime Achievement Anugerah Dewan Pers 2023

JAKARTA – Wartawan senior Atmakusumah Astraatmadja terpilih sebagai penerima penghargaan Lifetime Achievement dalam Anugerah Dewan Pers (ADP) 2023. Dewan Juri ADP 2023 secara bulat memilih Atmakusumah tanpa ada nomine lain karena kiprahnya di dunia pers nasional maupun internasional tidak perlu diragukan lagi. "Saya persembahkan penghargaan ini kepada senior-senior dan kawan-kawan saya yang telah mendahului saya," tutur Atmakusumah yang kini ini berusia 84 tahun saat menerima penghargaan di Hotel JW Marriott, Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Selain Atmakusumah, sosok lain yang berhasil meraih penghargaan dalam ADP 2023 tanpa ada pesaing adalah Letjen TNI (Purn) Muhammad Yunus Yosfiah (79



tahun). Mantan menteri penerangan terakhir pada masa kepemimpinan Presiden BJ Habibie itu terpilih sebagai pemenang dalam kategori Tokoh Masyarakat Pendukung Kemerdekaan Pers.

Penyerahan penghargaan ADP 2023 tersebut merupakan puncak dari rangkaian acara Pekan Anugerah Dewan Pers (ADP) yang dimulai sejak 7 November 2023. Diawali dengan agenda Dewan Pers Sambang Kampus di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, pada Selasa (7/11/2023), juga seminar nasional Jurnalistik yang Mengancam Jurnalisisme di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Rabu (8/11/2023).●

## Zillennial: Kebebasan Pers Kunci Negara Demokratis

### TANGERANG SELATAN

– Untuk mewujudkan negara demokratis, kebebasan pers harus dilindungi semua pihak. Meski kebebasan dan kemerdekaan pers telah tercantum dalam UU Pers, namun aksi kekerasan dan pembungkaman terhadap jurnalis tetap mengemuka.

Itulah salah satu hal yang disinggung tiga orang mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang, Selatan, Banten yang mewakili generasi zillennial pada diskusi panel mahasiswa bertema “Zillennial Memandang Kemerdekaan Pers dan Jurnalisisme Indonesia Masa Depan dalam Perspektif Kritis”, yang digelar di kampus Fakultas Dakwah



*Namun, terdapat beberapa syarat dalam UU Pers yang membedakan pers dengan persma. Meski begitu, terdapat beberapa kewajiban pers yang sebaiknya diikuti persma, seperti mengikuti Kode Etik Jurnalistik, tidak mempublikasikan fitnah, dan melakukan verifikasi berita.*



Dewan Pers melaksanakan kegiatan Dewan Pers Sambang Kampus UIN Syarif Hidayatullah pada Selasa (7/11/2023) di Tangerang Selatan, Banten. (FOTO: DEWAN PERS)

dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta, Selasa (7/11/2023). Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara “Dewan Pers Sambang Kampus” di beberapa perguruan tinggi.

Para zillennial dari UIN Ciputat ini juga menyinggung tentang perlindungan pers mahasiswa (persma). Mereka menginginkan adanya wujud konkrit perlindungan persma agar fungsi persma sebagai lembaga kontrol sosial di kampus bisa terwujud. Apalagi, persma merupakan bibit-bibit insan pers untuk masa depan.

Menanggapi orasi dari para zillennial sebelumnya, Asep Setiawan menyebutkan bahwa baik pers maupun persma sama-sama



memegang peranan penting dalam menjaga demokrasi. Namun, terdapat beberapa syarat dalam UU Pers yang membedakan pers dengan persma. Meski begitu, terdapat beberapa kewajiban pers yang sebaiknya diikuti persma, seperti mengikuti Kode Etik Jurnalistik, tidak mempublikasikan fitnah, dan melakukan verifikasi berita. ●

## Profesionalisme Media Turun, Kualitas Jurnalisme Kian Mengkhawatirkan

JAKARTA – Di era digital ini dunia menghadapi berbagai tantangan, terutama di bidang-bidang yang terdisrupsi. Salah satunya adalah media dan jurnalisme. Berbagai inovasi membantu mengembangkan dunia tersebut, namun di sisi lain justru mengancamnya.

Di Indonesia, hal ini terbukti dari banyaknya pengaduan yang masuk ke Dewan Pers terkait minimnya profesionalisme media. Semakin mudah dan murah sebuah media diciptakan di era digital, kualitas jurnalisme justru semakin mengkhawatirkan. Dari data yang diungkapkan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana, sebanyak 97 persen kasus pengaduan pelanggaran pers yang diterimanya dilakukan oleh media daring.

“Saat ini lebih banyak media yang tidak profesional. Jadi kalau ada



▲ Pemimpin Redaksi Konde.co, Luviana Ariyanti (kanan) menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan Seminar Nasional “Jurnalistik yang Mengancam Jurnalisme” pada Rabu (8/11/2023) di Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)



*Turunnya kualitas jurnalisme akan menyebabkan media ditinggalkan pembaca yang semakin cerdas.*

aduan 1.000 media ke Dewan Pers, itu biasanya terdiri dari 600 media yang tidak profesional. Banyak orang yang tidak memiliki kualifikasi yang mumpuni untuk membuat media,” tutur Yadi dalam Seminar Nasional “Jurnalistik yang Mengancam Jurnalisme” di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Hal senada juga diungkapkan oleh Luviana Ariyanti, anggota Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Turunnya kualitas jurnalisme akan menyebabkan media ditinggalkan pembaca yang semakin cerdas. Oleh karenanya, jurnalisme pun tak lagi berfungsi sebagai pengawas kekuasaan dan menuliskan persoalan publik. ● **Firda Azil**



### **Rapat Konsinyering Persiapan Kegiatan *Training of Trainer***

Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Dewan Pers menggelar rapat konsinyering persiapan kegiatan *Training of Trainer* pada Jumat (3/11/2023) di Tangerang Selatan, Banten.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh anggota Dewan Pers, Asep Setiawan dan Paulus Tri Agung Kristanto dengan Tenaga Ahli Dewan Pers, Suprpto, Pokja bersama staff Sekretariat Dewan Pers. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)







## Pertemuan dengan Konstituen

Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan Konstituen Dewan Pers pada Senin (13/11/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Pertemuan dihadiri oleh Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu bersama anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana tersebut membahas kekerasan yang dialami oleh wartawan di Aceh saat melakukan peliputan. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)







## Pertemuan dengan Dewan Pers Timor Leste

Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan Dewan Pers Timor Leste pada Selasa (14/11/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Hadir dalam pertemuan tersebut yakni Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu; Ketua Dewan Pers Timor Leste, Otelio Otte; anggota Dewan Pers, Totok Suryanto dan Atmaji Sapto Anggoro bersama dengan staff Sekretariat Dewan Pers. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





**Pertemuan dengan DPRD**

Anggota Dewan Pers, Totok Suryanto melakukan pertemuan dengan DPRD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin (20/11/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)







## Uji Publik Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Dewan Pers menggelar Uji Publik Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pers pada Senin (20/11/2023) di Jakarta.

Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu dan anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli tersebut dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari publik terhadap draft yang tengah disusun. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)

